



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH

**RAPAT KERJA DAN RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI V DPR RI
DENGAN MENTERI PUPR RI, MENTERI PERHUBUNGAN RI, MENTERI
DESA PDPT RI, KEPALA BMKG, KEPALA BNPP (BASARNAS)**

- Tahun Sidang : 2022-2023
Masa Persidangan : I
Rapat Ke- :
Jenis Rapat : Raker dan RDP
Sifat Rapat : Terbuka
Hari, Tanggal : Kamis, 8 September 2022
Waktu : Pukul 10.00 s.d. 11.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi V DPR RI, (Ruang KK V)
Gedung Nusantara DPR RI dan Secara Virtual *Zoom Cloud Meeting*
- Ketua Rapat : Lasarus, S.Sos., M.Si (F-PDIP) – Ketua Komisi V DPR RI
- Acara : Penetapan Hasil Pembahasan RKA K/L TA. 2023 Mitra Kerja Komisi V DPR RI dalam RAPBN TA. 2023
- Sekretaris Rapat : Nunik Prihatin Budiastuti, S.H., Kabag Komisi V DPR RI
- Hadir : A. Anggota DPR RI:
45 dari 55 orang Anggota dengan rincian:
1. FRAKSI PDI-PERJUANGAN (F-PDIP)
11 dari 11 orang Anggota
 1. Lasarus, S.Sos., M.Si.
 2. Bob Andika Mamana Sitepu, S.H.
 3. Mochamad Herviano
 4. Hj. Sadarestuwati, S.P., M.MA.
 5. Sukur H. Nababan, S.T.
 6. Ir. Sudjadi
 7. Sarce Bandaso Tandiasik, S.H., M.H.
 8. Sri Rahayu
 9. H. Irmadi Lubis
 10. Ir. Effendi Sianipar
 11. Harvey B. Malaihollo
 2. FRAKSI PARTAI GOLKAR (F-PG)
6 dari 8 orang Anggota
 1. Ir. Ridwan Bae
 2. Drs. Hamka B Kady, M.S.
 3. DR. H. Ali Mufthi, S.AG., M.Si.
 4. H. Tubagus Haerul Jaman, S.E.
 5. Muhammad Fauzi, S.E.
 6. Ir. H. Anang Susanto, M.Si

3. FRAKSI PARTAI GERINDRA
(F-GERINDRA)
5 dari 7 orang Anggota
 1. H. Andi Iwan Darmawan Aras, S.E., M.Si.
 2. Sudewo, S.T., M.T.
 3. Ir. Eddy Santana Putra, M.T.
 4. Drs. H. Mulyadi, M.MA.
 5. Ir. Sumail Abdullah

4. FRAKSI PARTAI NASDEM (F-NASDEM)
5 dari 6 orang Anggota
 1. Roberth Rouw
 2. Drs. H. Tamanuri, M.M.
 3. H. Syarif Abdullah Alkadrie, S.H., M.H.
 4. Drs. H. Soehartono, M.Si.
 5. Drs. Fadholi, M.Ikom.

5. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (F-PKB)
6 dari 6 orang Anggota
 1. H. Ruslan M. Daud
 2. H. Irmawan, S.Sos., M.M.
 3. H. Dedi Wahidi, S.Pd.
 4. Sofyan Ali, S.H.
 5. Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz, M.M.
 6. H. Syafiuddin, S.Sos.

6. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT (F-PD)
5 dari 5 orang Anggota
 1. Dr. H. Irwan S.IP., M.P.
 2. Willem Wandik
 3. drh. Jhonni Allen Marbun, M.M.
 4. Lasmi Indaryani, S.E.
 5. Ir. H. Ishak Mekki, M.M.

7. FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (F-PKS)
3 dari 5 orang Anggota
 1. Ir. H. Sigit Sosiantomo
 2. H. Syahrul Aidi Maazat, Lc., M.A.
 3. KH. Toriq Hidayat, Lc.

8. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL (F-PAN)
3 dari 5 orang Anggota
 1. Athari Ghauthi Ardi
 2. Hj. Hanna Gayatri, S.H.
 3. H. Boyman Harun, S.H.

9. FRAKSI PARTAI PERSATUAN
PEMBANGUNAN (F-PPP)

1 dari 2 orang Anggota

1. Dr. H. Muh Aras, S.Pd., M.M.

B. UNDANGAN:

1. Menteri PUPR RI (Dr. Ir. Mochamad Basuki Hadimoeljono, M.Sc.)
2. Menteri Perhubungan RI (Ir. Budi Karya Sumadi)
3. Menteri Desa PDTT RI (Dr. (HC) Drs. A. Halim Iskandar, M.Pd.)
4. Kepala BNPP (Basarnas) (Marsekal Madya TNI Henri Alfiandi, M.Han.)
5. Kepala BMKG (Prof. Ir. Dwikorita Karnawati, M.Sc., Ph.D)

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS., M.Si./F-PDIP):

**Kepala Badan SAR Nasional,
Kepala BMKG beserta seluruh jajaran hadirin yang berbahagia,**

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena kasih-Nya dan rahmat-Nya kita dapat hadir pada rapat siang hari ini sesuai jadwal yang sudah kita sampaikan.

Menurut informasi yang kami terima dari Sekretariat Jenderal, bahwa sudah hadir 40 orang Anggota Komisi V DPR RI dari 55 Anggota Komisi V DPR RI dari 9 unsur fraksi yang berbeda. Maka sesuai dengan ketentuan Pasal 281 Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib, rapat ini sudah memenuhi kuorum. Izinkanlah, kami membuka rapat pada hari ini dan sesuai dengan ketentuan Pasal 276 ayat (1) Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR RI pada hari ini saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 10.00 WIB)

Terima kasih, kami sampaikan kepada Ketua DPR RI atau Wakil Ketua DPR RI, Pak Rachmat Gobel, yang sudah berkenan hadir. Kita kasih *applause* dulu buat Pak Rachmat Gobel. Beliau ini sangat setia mengawal Komisi V, ya, kami sudah sering didampingi Beliau dalam melaksanakan rapat-**rapat kerja** maupun **rapat dengar pendapat**. Demikian juga terima kasih kami sampaikan kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang hadir secara virtual, Menteri Perhubungan, Menteri Desa PDT dan Transmigrasi, Kepala BMKG, dan Kepala Basarnas beserta seluruh jajaran yang sudah menghadiri undangan kami pada siang hari ini.

**Pimpinan dan Anggota Komisi V yang saya hormati,
Para Menteri, Kepala Badan,**

Bapak-Ibu sekalian yang berbahagia,

Berdasarkan ketentuan Pasal 98 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 dan Peraturan Tata Tertib DPR RI Pasal 59 ayat (2) huruf c dan sesuai dengan jadwal pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang RAPBN Tahun Anggaran 2022, yang disusun oleh Badan Anggaran DPR RI, maka Komisi V DPR RI bersama Pemerintah dengan seluruh mitra kerjanya pada hari ini melaksanakan **rapat kerja**, menindaklanjuti serangkaian **rapat kerja** dan **rapat dengar pendapat** yang sudah kita lalui beberapa waktu yang lalu dalam rangka kita membahas dan menetapkan RAPBN Tahun Anggaran 2023 untuk masing-masing mitra kerja Komisi V DPR RI.

Beberapa hal yang ingin saya sampaikan dalam rapat ini yang pertama tanggal 24 Agustus 2022 yang lalu, Rapat Kerja dengan Menteri Perhubungan, Menteri Desa PDT dan Transmigrasi dan Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala BMKG, Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan kemudian yang kedua tanggal 25 Agustus 2022, Rapat Kerja dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Kemudian, pada tanggal 29 Agustus sampai dengan 7 September 2022 yang lalu telah dilaksanakan Rapat Dengar Pendapat dengan para pejabat Eselon I dari masing-masing Kementerian/Lembaga mitra kerja Komisi V DPR RI dalam rangka pembahasan program dan alokasi anggaran masing-masing unit organisasi Eselon I.

Sebagai lanjutan dalam rangkaian pembahasan Anggaran Tahun 2023, maka agenda raker dan **rdp** kita pada hari ini adalah Penetapan Hasil Pembahasan Rincian Program dan Alokasi Anggaran Kementerian dan lembaga dan/atau Badan Mitra Kerja Komisi V DPR RI dalam RAPBN Tahun 2023 yang hasilnya akan segera disampaikan kepada Badan Anggaran DPR RI, besok.

Sesuai dengan jadwal pembahasan anggaran dari Badan Anggaran, Komisi masih punya alokasi waktu dari tanggal 21 sampai 26 September 2022 untuk melakukan penyesuaian RKA K/L, mitra kerja Komisi V DPR RI sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran dan juga melakukan sinkronisasi terhadap rincian program dan alokasi anggaran dalam APBN Tahun 2023 sesuai masukkan dan usulan dari Komisi V DPR RI.

**Para Menteri yang kami hormati,
Para Kepala Badan,
Beserta seluruh jajaran yang kami hormati,**

Rentang waktu antara 21 sampai 26 itu manakala ada tambahan. Kami masih nunggu dari Badan Anggaran nanti setelah finalisasi, apakah dari Badan Anggaran ada tambahan anggaran untuk mitra kerja Komisi V? Manakala ada maka dalam rentang waktu itu kita akan mengundang kembali mitra kerja Komisi V Kementerian/Lembaga untuk kita menetapkan kembali besaran

anggaran mitra kerja Komisi V setelah mendapat tambahan atau pengurangan dari Badan Anggaran DPR RI.

**Pimpinan, Anggota Komisi V DPR RI,
Para Menteri serta Kepala Badan yang kami hormati,**

Berdasarkan hasil rapat-rapat pembahasan RKA K/L Kementerian Lembaga mitra kerja Komisi V DPR RI dalam RAPBN Tahun Anggaran 2023 beberapa waktu lalu, maka rincian program dan alokasi anggaran untuk masing-masing mitra kerja Komisi V DPR RI dalam RAPBN Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut.

Tolong tabelnya ditampilkan.

Baik, tabelnya tolong dibagikan kepada mitra, dibagikan juga semua Anggota sudah dapatkah? Tolong dibagikan kepada semua Anggota juga. Dibagikan dulu nanti baru saya bacakan. Tolong dibagikan kepada **semua** Anggota dulu. Sini, Pimpinan semua.

Baik kita sembari ini dibagikan mungkin bisa lihat juga di layar, ya. Saya akan bacakan satu per satu ini pasti makan waktu yang agak lama karena agak banyak, ya. Karena ini berkaitan dengan penetapan besaran nilai-nilai baik dari Kementerian/Lembaga maupun untuk masing-masing pejabat Eselon I nya.

Yang pertama, dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Saya hanya akan membacakan nota keuangannya saja ya, dan penyesuaian, yang tabel lain itu tidak perlu saya bacakan ya. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Nota Keuangan RAPBN Tahun 2023 sebesar Rp125.217.457.471.000. Penyesuaian nota keuangan RAPBN Tahun 2023, tidak ada penyesuaian, sehingga angkanya tetap pada Rp125.217.457.471.000, dengan rincian sebagai berikut, ya. Sekretariat Jenderal. Saya hanya bacakan angka terakhir saja yaitu di penyesuaian nota keuangan RAPBN Tahun 2023 saja, karena itu yang kita tetapkan.

1. Sekretariat Jenderal Rp586.879.998.000, kemudian
2. Inspektorat Jenderal Rp90.265.143.000,
3. Ditjen Bina Marga Rp49.311.545.112.000, kemudian
4. Ditjen Cipta Karya Rp25.030.712.810.000,
5. Ditjen Sumber Daya Air Rp41.948.407.521.000,
6. Ditjen Perumahan Rp6.975.596.760.000,
7. Ditjen Bina Konstruksi Rp567.636.233.000,
8. Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Rp140.755.918.000,
9. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Rp399.738.585.000, kemudian
10. Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan sebesar Rp165.919.391.000.

Yang kedua, Kementerian Perhubungan. Pagu Penyesuaiannya Rp33.441.189.844.000 dengan rincian Eselon I, sebagai berikut.

1. Sekretariat Jenderal Rp541.154.856.000, kemudian
2. Inspektorat Jenderal Rp96.646.131.000,

3. Ditjen Perhubungan Darat Rp5.460.905.603.000, kemudian
4. Ditjen Perhubungan Laut Rp8.799.307.413.000,
5. Ditjen Perhubungan Udara Rp7.178.218.324.000,
6. Ditjen Perkeretaapian Rp7.274.665.225.000,
7. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Rp3.665.888.200.000,
8. Badan Kebijakan Transportasi Rp164.691.139.000,
9. Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Rp259.712.953.000.

Yang ketiga, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Penyesuaian nota keuangan RAPBN Tahun 2023. Ini angka terakhir yang diterima oleh Kementerian. Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi Rp2.997.030.851.000 dengan rincian sebagai berikut.

1. Sekretariat Jenderal Rp221.170.000.000,
2. Inspektorat Jenderal Rp49.000.674.000,
3. Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Rp131.339.762.000,
4. Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Pedesaan Rp234.356.528.000,
5. Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Rp230.459.248.000,
6. Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Rp90.564.634.000;
7. Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Rp251.553.559.000;
8. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Rp1.787.913.120.000.

Kemudian, berikutnya BMKG. Pagu terakhir yang diterima sebesar Rp3.010.572.747.000 yang terbagi dari, yang terdiri dari.

1. Program dukungan manajemen sebesar Rp1.365.800.855.000,
2. Program MKG sebesar Rp1.644.771.892.000.

Kemudian, yang terakhir Kementerian, *sorry*, yang terakhir Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas. Pagu terakhir yang diterima adalah sebesar Rp1.888.027.534.000 yang terdiri dari.

1. Program dukungan manajemen sebesar Rp860.201.546.000;
2. Program pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan dan bencana sebesar Rp1.027.825.988.000.

Demikian Bapak-Ibu sekalian, angka yang sudah saya sampaikan sampai dengan pembahasan terakhir di Komisi V bersama mitra kerja Komisi V. Manakala tidak ada tambahan nanti dari Badan Anggaran, maka inilah angka terakhir untuk APBN masing-masing mitra kerja Komisi V mulai dari Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri Perhubungan, Menteri Desa PDT, dan Transmigrasi, Kepala BMKG dan Badan Nasional Pencarian Pertolongan.

Bapak-Ibu sekalian yang kami hormati,

Berdasarkan tabel rincian program yang sudah saya bacakan, saya perlu mendengarkan jawaban dari masing-masing komisi sesuai mekanisme yang diatur dalam tata tertib, saya akan tanyakan satu-persatu kepada seluruh Anggota Fraksi yang ada di Komisi V DPR RI. Saya mulai dari PDI-Perjuangan apakah dapat disetujui?

ANGGOTA KOMISI V DPR RI F-PDIP:

Kami dari Fraksi PDI Perjuangan menyetujuinya, Ketua. Terima kasih.

KETUA RAPAT:

(RAPAT: SETUJU)

Kemudian Fraksi Golkar. Saya persilakan, Pak Hamka.

F- P. GOLKAR (Drs. HAMKA B. KADY, MS):

Terima kasih.

Setuju, Pimpinan. Terima kasih.

KETUA RAPAT:

(RAPAT: SETUJU)

Fraksi Gerindra, silakan.

F- P. GERINDRA (Ir. SUMAIL ABDULLAH):

Setuju, Pimpinan

KETUA RAPAT:

Baik terima kasih, Pak Sumail.

(RAPAT: SETUJU)

Fraksi Partai Nasdem saya persilakan.

F- P. NASDEM (Drs. H.TAMANURI, M.M.):

Kami dari Partai Nasdem menerima dengan catatan.

KETUA RAPAT:

Catatannya mana, Pak?

F- P. NASDEM (Drs. H.TAMANURI, M.M.):

Nanti, nanti disampaikan.

KETUA RAPAT:

Baik.

(RAPAT: SETUJU)

Catatan harus disampaikan, Pak, itu mekanisme. Sesuai mekanisme catatannya harus ada Pak, karena bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan rapat. *Ndak*, harusnya disampaikan.

F- P. NASDEM (Drs. H.TAMANURI, M.M.):

Sebentar Pak, nanti saya koordinasi dengan Ketua Fraksi.

KETUA RAPAT:

Baik, saya kasih kesempatan dulu. Saya cabut dulu ketok nya, ya. Untuk Nasdem saya cabut dulu ketoknya, cabut ketoknya pakai ketok juga. Nasdem saya tunda dulu.

(RAPAT: SETUJU)

Baik. Saya lanjut dulu ke Partai Kebangkitan Bangsa. Apakah dapat disetujui?

ANGGOTA KOMISI V DPR RI F-PKB:

Terima kasih, Pak Ketua. Setuju.

KETUA RAPAT:

Baik. Terima kasih.

(RAPAT: SETUJU)

Kemudian Partai Demokrat.

F- P. DEMOKRAT (Dr. H. IRWAN S.IP., M.P.):

Terima kasih Ketua, kami konsisten sesuai dengan yang sudah dibahas kami setuju Ketua.

KETUA RAPAT:

Baik, oposisi setuju.

(RAPAT: SETUJU)

Baik, PKS kami persilakan.

ANGGOTA KOMISI V DPR RI F-PKS:

Terima kasih Ketua. Dari Fraksi PKS setuju, Ketua.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

(RAPAT: SETUJU)

Dari PAN. Fraksi PAN. Baik Fraksi PAN karena tidak ada yang datang kita anggap menyetujui. Baik dari PPP saya persilakan Pak Tamliha tadi ada atau ya Pak Aras. Atau hadir secara virtual PPP atau PAN? Ya, silakan Pak Aras, silakan.

F- PPP (Dr. H. MUH. ARAS, S.Pd., M.M.):

PPP setuju, Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih.

Alhamdulillah.

(RAPAT: SETU)

Baik dari PAN mungkin ada yang hadir secara virtual, saya persilakan Fraksi Partai Amanat Nasional kita kasih kesempatan. Fraksi Partai Amanat Nasional. Baik, kalau begitu karena rapat ini sudah melebihi 50+1. Baik kita anggap menyetujui.

Silakan terakhir saya tanya kembali kepada Fraksi Partai Nasdem. Silakan juru bicara, Pak Tamanuri. Saya persilakan.

F- P. NASDEM (Drs. H.TAMANURI, M.M.):

Pada dasarnya semua dari Kementerian, kami setuju semua hanya saja dengan catatan dari Kementerian PUPR kami mengharapkan supaya semua program-program lebih terfokus lagi terutama program-program yang menyangkut kehidupan masyarakat seperti halnya *stunting* dan sebagainya. Ini cuman itu saja saya rasa.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik terima kasih.

Pak Menteri pasti mendengar ya, terkhusus ada catatan program-program kemasyarakatan terutama yang terkait dengan *stunting* gitu Pak ya? iya, terkait dengan *stunting* mungkin air bersih dan seterusnya ya. Jadi, itu saja catatannya, setuju. Bisa ketok Pak Roberth ya?

(RAPAT: SETUJU)

Baik, terima kasih. Saya minta persetujuan dari kita semua ya? Setuju?

(RAPAT: SETUJU)

Pemerintah setuju?

(RAPAT: SETUJU)

Baik, maka dengan demikian selesai rapat kita pada hari ini dalam rangka menyetujui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara mitra kerja Komisi V. Sebelum saya akhiri mungkin dari meja Pimpinan ada yang mau disampaikan saya persilakan Pak Ketua mungkin Pak Gobel? Nggak ada. Pak Iwan? Tidak ada. Puas? Baik.

F- P. GERINDRA (SUDEWO, S.T., M.T.):

Pimpinan, Pimpinan.

F- P. DEMOKRAT (Dr. H. IRWAN S.IP., M.P.):

Interupsi

KETUA RAPAT:

Sebentar Mas Dewo, sebentar.

Silakan, Pak Dewo.

F- P. GERINDRA (SUDEWO, S.T., M.T.):

Terima kasih, Pimpinan.

Saya apresiasi ini sudah *clear* soal RKA K/L Tahun Anggaran 2023. Saya hanya ingin mengingatkan khususnya kepada Kementerian PUPR supaya khususnya program yang berbasis kerakyatan itu segera diterbitkan surat keputusannya karena program ini sangat ditunggu masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, kami berharap juga dari Kementerian PUPR supaya segera dilakukan lelang dini supaya bisa segera memberikan lapangan kesempatan kerja kepada warga terhadap pelaksanaan APBN ini.

Terima kasih, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Terima kasih, Pak Dewo. Silakan, Pak Irwan. Habis itu Pak Sigit.

F- P. DEMOKRAT (Dr. H. IRWAN S.IP., M.P.):

Terima kasih, Pimpinan. Saya ingin bertanya melalui Pimpinan. Kementerian PUPR, saat ini Kementerian PUPR sudah tidak punya Wamen ya secara struktur?

MENTERI PUPR RI (Dr. (H.C.) Ir. H. MOCHAMAD BASUKI HADIMOELJONO, M.Sc., Ph.D.):

Nggak punya, Pak.

KETUA RAPAT:

Ya tidak punya, Pak Menteri sudah jawab.

F- P. DEMOKRAT (Dr. H. IRWAN S.IP., M.P.):

Oh iya.

KETUA RAPAT:

Baik.

F- P. DEMOKRAT (Dr. H. IRWAN S.IP., M.P.):

Nah, ke Menteri Desa PDT masih punya Wamen Pak?

KETUA RAPAT:

Masih.

F- P. DEMOKRAT (Dr. H. IRWAN S.IP., M.P.):

Ini saya tidak pernah lihat Wamennya Kementerian Desa PDT ini.

KETUA RAPAT:

Masih keliling Mas, lagi keliling. Lagi ninjau desa-desa.

F- P. DEMOKRAT (Dr. H. IRWAN S.IP., M.P.):

Ya, ini kita harus tegur ini karena tugas tujuan Wakil Menteri dibuat oleh Pak Jokowi ini kan untuk membantu Menteri Desa. Daripada sibuk-sibuk

keliling, musyawarah-musyawarah nggak jelas saya pikir lebih baik fokus membahas anggaran untuk rakyat, Ketua.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Ini saran yang mantap Pak. Nggak perlu ditanggapi Pak Menteri ya, cukup jadi catatan supaya *ndak* panjang ini.

Ya, Pak Syarief, Pak Syarief. Sebentar, *sorry* Pak Syarief dulu. Silakan.

F- P. NASDEM (H. SYARIEF ABDULLAH ALKADRIE, SH., MH):

Terima kasih.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Pimpinan dan dari Kementerian pada hari ini,

Pertama berkaitan dengan ini, saya perlu mengingatkan, **yang** pertama tidak henti-hentinya Pak, berkaitan karena masih juga terjadi di lapangan berkaitan dengan prioritas penggunaan produk dalam negeri, Pak. Saya kira ini sangat pentinglah apalagi dengan kondisi kita yang sekarang ini.

Yang kedua ini juga perlu dipikirkan dengan kenaikan APBN *eh* dengan kenaikan BBM ini, ini tentu banyak proyek-proyek Bapak yang sudah *multiyears* yang kontrak pertama. Tentu ini akan mempengaruhi terhadap para pelaku-pelaku usaha sehingga dengan demikian ini tentu harus ada jalan keluar juga bagi kita karena cukup besar kenaikan ini. Saya kira ini sangat penting.

Ketiga, saya tidak bisa melihat secara utuh dari keseluruhan berkaitan dengan program-program ini secara rinci baik ke Perhubungan maupun PU dan Desa dan yang lain-lain termasuk Basarnas dan BMKG, sebagaimana yang selalu kita sampaikan tadi mudah-mudahan, apa, program kerja di masing-masing itu berkeadilan dalam rangka untuk mengakomodir berkaitan dengan sesuai dengan apa yang menjadi aspirasi yang disampaikan baik itu kunker, Dapil, kunker, reses, dan lain-lainnya berkaitan dengan aspirasi yang ada itu yang menjadi prioritas karena masih ada juga ternyata program-program yang harusnya kita lihat tidak menjadi prioritas tetapi menjadi prioritas di dalam programnya, ini sehingga dengan demikian ya, berkaitan dengan ini kami juga biasa di Dapil yang tidak prioritas kok, ada gitu padahal kita ada prioritas yang kita usulkan tidak masuk malahan.

Saya kira ini. Terima kasih.

Wallahul muwaffiq ila aqwamit-tharieq.
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Syarief.

F- P. DEMOKRAT (WILLEM WANDIK, S.Sos.):

Pak Ketua.

F- PKS (Ir. H. SIGIT SOSIANTOMO):

Interupsi Ketua.

KETUA RAPAT:

Silakan. Panjang ini. Pak Sigit ya interupsi. Memang kita hanya interupsi saja medannya hari ini. Silakan Pak Sigit. Pak Sigit dulu Pak Sigit habis Pak Sigit, Pak Sumail, Pak Sigit ini senior Pak. Silakan.

F- PKS (Ir. H. SIGIT SOSIANTOMO):

Pak Sumail sabar sama-sama Jawa Timur, sesama bis kota dilarang saling mendahului.

Pak Ketua saya sebetulnya ingin protes kepada Pak Ketua, kenapa? Karena itu *ngetok* itu kayak ngejar-ngejar orang saja, ini forum serius pengambilan keputusan Anggota DPR yang mewakili rakyat Indonesia. Ini ketok, ketok, sudah setuju Pak, kayak dikejar-kejar. Saya khawatir karena ada Pak Rachmat Gobel di sebelahnya. Rupanya dikejar-kejar Pak Rachmat. Ini saya heran juga PDIP sampai dikejar-kejar sama Nasdem ini. Pak Ketua saya kira.

KETUA RAPAT:

Aman Pak, aman Pak, aman-aman. Tenang saja, aman.

F- PKS (Ir. H. SIGIT SOSIANTOMO):

Pak Ketua terus terang ya, ini kita, **kita** ingin *ngomong* sesuatu ini karena kita tidak ingin menyetujui segala sesuatu dalam kondisi yang serba apa ya, serba terburu-buru. Kita tidak ingin terburu-buru. Kami setuju tadi seperti dikatakan oleh Fraksi Kapoksi PKS setuju terhadap apa namanya, anggaran ini untuk dibahas lebih lanjut walaupun sebetulnya masih ada kemungkinan berubah, angka-angka yang berubah karena kami setuju berdasarkan pembahasan, kan kita sudah bahas sejak beberapa hari yang lalu ya sudah kita bahas dan kita setuju.

Tetapi dalam pembahasan terakhir kemarin terkait dengan PNB (Pendapatan Negara Bukan Pajak) yang sempat saya sampaikan terkait dengan pendapatan bukan pajak di Direktorat Jenderal Perhubungan Darat ya, yang dikumpulkan oleh Sekjen Perhubungan sebetulnya masih mungkin ada

angka yang berubah. Kemarin kalau nggak salah 1,2 T dan mungkin berubah jadi 1,4 T. Nah, yang begini-begini ini kan angka-angka belum sempat kita *crosscheck* ke dokumen yang disampaikan oleh Pak Ketua.

Jadi, saya kira Pak Ketua menjadi catatan bahwa persetujuan kita bersama dengan jawaban dari Pemerintah artinya jawaban Pemerintah terhadap persetujuan ini menjadi sesuatu yang tidak terpisahkan. Pak Menteri ini kebetulan ada Pak Menteri di sini, kemarin kita sempat bahas *discuss* tentang angka-angka itu dan mungkin saja berubah jadi jawaban nanti dari Pemerintah itu menjadi sesuatu yang tidak terpisah dari persetujuan kita terhadap angka-angka yang disetujui oleh Komisi V untuk dilanjutkan dibahas dalam di Badan Anggaran.

Pak Ketua saya kira itu.

F- P. DEMOKRAT (WILLEM WANDIK, S.Sos.):

Pak Ketua, interupsi.

F- PKS (Ir. H. SIGIT SOSIANTOMO):

Lain-lain nanti kita lanjutkan di belakang. Terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

KETUA RAPAT:

Baik terima kasih.

Pertama saya mau klarifikasi saya tidak dikejar-kejar Pak, dengan santai kalau sudah jawab ya saya ketok dong kecuali, bahkan tadi Nasdem juga kasih kesempatan kan keleluasaan. Nggak kan? Nggak. Cuma Pak Sigit kelihatannya masih ada sesuatu yang belum pas kelihatannya tapi *ndak* apa-apa Pak Sigit nanti kita diskusi lebih lanjut. Beliau sahabat lama saya dulu di meja Pimpinan ini. Baik.

F- P. DEMOKRAT (WILLEM WANDIK, S.Sos.):

Pak Ketua interupsi.

KETUA RAPAT:

Ya Pak Willem? *Ndak*, nanti saya, saya, Pak Sumail dulu Pak, nanti saya salah. Habis Pak Sumail, Pak Willem nanti Pak Sumail protes saya lagi. Silakan.

F- P. GERINDRA (Ir. SUMAIL ABDULLAH):

Baik terima kasih Pimpinan.

Yang terhormat kepada semuanya,

Biar singkat karena tadi sudah selesai, apa namanya, tapi kami ada beberapa catatan atau mengingatkan dan ingin menekankan bahwa di dalam penyusunan program memang seyogyanya kita harus perhatikan kunjungan-kunjungan kita, Pak. Tadi, sudah diulas oleh kawan dari Nasdem tapi saya akan lebih mempertegas lagi tentang titik-titiknya. Contoh kemarin kami kunjungan spesifik ke Bengkulu. Tempo hari Pak Menteri, Pak Menteri PUPR juga datang ke sana ada jalan yang seharusnya dibangun sudah ada direktif namun baru 50%, ya. Kami disambut dengan baik di sana Pak dan mereka mengumpulkan seluruh kepala daerah di tingkat kabupaten menyampaikan keluhan-keluhannya kepada kami dan kalau ini tidak diakomodir tentu akan menimbulkan kekecewaan, percuma kami datang ke sana.

Titik yang kedua Sumatera Barat dan Maluku Utara, mohon ini menjadi perhatian. Kaitanya dengan Dapil saya Pak, saya cerita Dapil dulu sedikit. Bondowoso ini secara geografis saya kemarin juga pernah apa namanya, sampaikan bahwa sedikit terisolir dan kurang afirmasi dari APBN-APBN. Mohon pada kesempatan program yang akan datang di 2023 karena kemiskinan di situ juga besar di Jawa Timur, secara geografis tidak menguntungkan juga tidak dilalui jalan nasional untuk mendapatkan perhatian khusus. Kalau di sini ada beberapa KaBalai yang juga sempat hadir secara virtual untuk memberikan konsentrasi penuh di Kabupaten Bondowoso.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Urusan Dapil sudah selesai kemarin-kemarin ya, sehingga tidak ada lagi urusan Dapil. Pak Willem dulu, habis Pak Willem, Pak Irmadi. Silakan.

F- P. GOLKAR (Drs. HAMKA B. KADY, MS):

Saya interupsi terakhir, Pak.

KETUA RAPAT:

Baik nanti Pak Hamka merangkum semuanya.

F- P. DEMOKRAT (WILLEM WANDIK, S.Sos.):

Baik.

**Pak Ketua, Pimpinan, dan Bapak-Ibu Anggota Komisi V,
Dan Menteri PUPERA, Perhubungan, Menteri Desa PDT Transmigrasi,
BMKG dan Basarnas serta seluruh jajarannya diberkati Tuhan Yang Maha
Kuasa,**

Kami dari Fraksi Partai Demokrat dalam penetapan RKA K/L Kementerian/Lembaga yang menjadi mitra Komisi V telah menyetujui namun pada kesempatan ini kami juga ingin memberikan sedikit catatan kepada mitra dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang sedang diemban.

Pertama, kami berharap Kementerian/Lembaga Mitra Komisi V memperhatikan kembali perencanaan dan realisasi sumber dana yang bersumber dari pinjaman luar negeri agar tidak lagi ada pinjaman luar negeri yang terblokir di tengah tahun berjalan dan realisasi yang sangat kecil. Dan, yang kedua khususnya untuk Kementerian Desa agar lokasi dan lokasi program yang reguler lebih diprioritaskan pada 62 daerah tertinggal yang telah ditetapkan oleh Presiden dan desa tertinggal dan juga program kegiatan bagi desa maju dan mandiri. Dan ketiga, alokasi anggaran program untuk kegiatan mitra kerja termasuk program padat karya semoga dapat menjadi perhatian prioritas bagi Dapil Komisi V.

Sekian, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Willem. Silakan Pak Irmadi.

F- PDIP (H. IRMADI LUBIS):

Terima kasih.

**Pimpinan yang saya hormati,
Seluruh kita yang hadir pada rapat hari ini sekarang,**

Saya kira saya khusus ke Kementerian Desa. Saya sebagai salah satu yang ikut menggagas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di mana, di dalam itunya adalah bagaimana kita tujuan undang-undang itu adalah bagaimana kita melindungi dan menjadikan desa itu desa kuat, maju, mandiri, dan demokratis. Dan, sekarang apa ini Kementerian Desa ini ada sedikit apa, mungkin agak membingungkan. Sebagian dari tugasnya yaitu transmigrasi masuk kategori kedua, Kementerian kedua, sedangkan yang lainnya itu masuk ke tiga. Oleh karena itu, dengan anggaran segini sampai saya kira kiamat kurang dua hari pun kita tidak akan dapat melaksanakan Undang-Undang 6 Tahun 2014 itu.

Oleh karena itu, saya minta kita sekalian terutama pada Kementerian Desa untuk anggaran selanjutnya supaya bagaimana kita bisa meningkatkan Anggaran Desa kalau perlu kita artinya merubah Undang-Undang 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara jadi menjadikan Kementerian Desa ini *full* jadi Kementerian kelas 2 di dalam Pemerintahan.

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Baik terima kasih, Pak Irmadi.

Saya setuju Pak, kalau masih dengan undang-undang yang sekarang Pak, nggak bisa, ya beginilah dia, ini jadi konsen kita. Kalau memang *anu* nanti kita rapat internal terkait dengan Prolegnas boleh ini menarik ini untuk kita bahas. Kita perlu pencerahannya nanti Pak Irmadi ya perlu **pencerahannya** terkait soal ini sehingga Kementerian ini ke depan bisa kita perkuat.

Baik.

F- PKB (H. SYAFIUDDIN, S.Sos.):

Izin Pak Hamka, mungkin interupsi, sebelum Pak Hamka Pak, Pak **Hamka** yang paling akhir. Dirangkum Pak. Mohon izin Pak Hamka.

KETUA RAPAT:

Oh ya silakan Pak. Silakan karena tadi kita ngomong soal Menteri Desa jadi dari PKB bicara. Silakan.

F- PKB (H. SYAFIUDDIN, S.Sos.):

Izin, terima kasih Pimpinan.

Sesuai dengan apa yang disampaikan Kapoksi kita menerima namun kami ingin ada kesepakatan dan kemufakatan juga di ruangan ini bahwa sesuai dengan Inpres Nomor 4 Tahun 2022 kita ingin ada kemufakatan bahwa amanah dari Instruksi Presiden ini betul-betul dilanjutkan dan diimplementasikan oleh Kementerian ataupun lembaga karena di inpres ini adalah percepatan pengentasan kemiskinan kawasan ekstrem dan saya cuman ini memberikan informasi bahwa Madura ini ada dua kabupaten yang miskin ekstrim, Pak, mungkin tidak ada salah dan bukan sebuah kejahatan apabila Kementerian dan lembaga memberikan anggaran yang banyak khusus di Pulau Madura.

Mungkin itu, terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Syafiuddin.

Sekarang saya mau meminta Menteri Desa, tolong dicatat Pak Menteri, tolong dicatat dua kabupaten itu. Terakhir Pak Hamka, silakan Pak.

F- P. GOLKAR (Drs. HAMKA B. KADY, MS):

Terima kasih Pimpinan.

Bissmilahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

**Pimpinan dan seluruh Anggota yang saya hormati,
Pak Menteri Desa, Pak Menteri Perhubungan, Menteri PU, Kepala Badan,
dua badan di sini, dan
Hadirin sekalian,**

Saya hanya ingin menyampaikan dan mengapresiasi dari Kementerian Perhubungan terkait apa yang disampaikan oleh Pak Sigit tadi, kita harus beri *applause* dan penghargaan sebenarnya satu-satunya Kementerian di mitra kerja Komisi V mampu menambahkan target PNBPN-nya Tahun 2023 adalah Kementerian Perhubungan sebesar 1 triliun. Catatan-catatan yang ada kemarin tentu akan menyesuaikan target apa yang diinginkan oleh Kementerian, itu yang harus kita *support*.

Ini jujur saya sampaikan itu *surprise* benar padahal angka yang diajukan oleh Pemerintah itu hanya 7 triliun Pak Menteri, *Alhamdulillah* angka-angka yang disebut Pak Sigit tadi itu akan bisa berkembang lagi, itu hanya sebagian kecil. Target yang ditargetkan oleh Kementerian Perhubungan ini 8 triliun Pak, tambah 1 triliun daripada yang lalu. Oleh karena itu, tentu saya Anggota Banggar dan ada Pimpinan juga di sini mengapresiasi itu apalagi saya bangga ada di Komisi V bersama dengan Kementerian Perhubungan.

Saya kira itu yang bisa saya sampaikan Pak Ketua. Terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

KETUA RAPAT:

Baik sebelum saya lanjutkan ke kesimpulan rapat, silakan dari meja Pimpinan, Pak Roberth mau bicara? Silakan.

F- P. NASDEM (ROBERTH ROUW) – WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:

Baik, terima kasih Pimpinan.

Saya langsung biar lebih cepat.

**Pimpinan dan seluruh Anggota, para mitra yang saya hormati,
Wakil ketua DPR RI,**

Kenapa tadi saya kira saya salah satu Pimpinan di depan dan saya sebagai Ketua Fraksi jadi ini beban saya. Tetapi, saya ingin sampaikan bahwa kenapa saya minta ada catatan, supaya kami bisa punya ruang untuk berbicara

karena kalau kami terima ya sudah selesai gitu, makanya saya lihat tadi teman-teman kok memberikan catatan, tadi diterima kok.

Maka menurut saya ke depan harusnya penyampaian persetujuan di komisi ini melalui Kapoksi dan itu fraksi, pendapat fraksi bukan Kapoksi. Maka ada catatan-catatan yang selalu kami sampaikan dengan catatan-catatan itu ujungnya kami dapat terima tapi catatannya jelas untuk perbaikan di para mitra. Apa yang perlu menjadi catatan silakan itu dijalankan tapi ada catatan untuk mitra kami supaya itu menjadi perhatian iya kan, bukan cuma kami tanya setuju tidak? Iya kan setuju. Fraksi loh bukan Kapoksi tok, maka ada catatan di fraksi "Oh iya benar kami di fraksi punya gitu". Sebagai Pimpinan fraksi saya punya bahwa Komisi V, fraksi menerima dengan catatan. Kalau di nanti ya rakyat bertanya ya kami punya catatan, kok. Ada koreksi kami untuk perbaikan iya kan, itu yang ingin saya sampaikan.

Mohon maaf Pak Pak Bas, saya kira saya sangat ini dengan program-program, tapi kan kami punya semua iya kan yang harus kami berikan juga untuk kinerja para Menteri melihat itu, ya kan, anggaran kami setuju tapi ada catatan supaya pengelolaan ini, karena kita tahu ya kan khusus ya. Saya melihat bahwa terutama program-program yang menjadi aspirasi kunjungan kerja kami iya kan, itu yang saya minta catatan itu bahwa itu harus ada semuanya di sana ya kan.

Yang berikut tentang bagaimana anggaran yang kami setuju pengelolaannya ke depan. Dengan sistem yang kami lihat selama ini berjalan, sistem tender yang begitu amburadul iya kan, persaingan yang tidak fair iya kan, korbannya apa? Korbannya kualitas daripada apa yang kita putuskan. Ini yang menjadi catatan-catatan kami sebagai Partai Nasdem saya sampaikan. Maka itu yang ingin kami catat untuk memberikan garis untuk menjadi perhatian di Kementerian.

Saya kira itu Pimpinan. Jadi, kami setuju dengan anggaran ini tapi **pengelolaannya**, pemanfaatnya itu yang kami berikan catatan agar itu menjadi perhatian di dalam pengelolaan anggaran yang kami setuju.

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih Pak Roberth. Ya itu urusan rumah tangga Nasdem, kita tidak kasih *comment*. Silakan Pak Ridwan. Ya, sudah cukup? Cukup. Pak Iwan masih ada yang mau ditambah? Cukup? Baik.

F- P. NASDEM (H. SYARIEF ABDULLAH ALKADRIE, SH., MH):

Pak Ketua saya sedikit, setengah menit saja ini.

KETUA RAPAT:

Mau dua dikit pun saya kasih, nanti anggaran nggak ada nih Pimpinan Banggar.

F- P. NASDEM (H. SYARIEF ABDULLAH ALKADRIE, SH., MH):

Tenang Pak Ketua, kita baru asumsi masih bisa kesempatan Pak Ketua. Saya harus sampaikan ini karena ini merupakan sikap fraksi dan partai untuk mencapai karena ini berkaitan dengan persoalan keadilan Pak, terhadap kemarin juga pada saat laporan Tahun Anggaran 2021, pertanggungjawaban keuangan berkaitan dengan masalah ganti rugi lumpur Lapindo itu Pak, karena ini sampai saat ini belum juga terselesaikan sehingga kita di Banggar juga kemarin membahas tapi kan tentu juga karena ini kaitannya di Komisi V di Kementerian PUPR ya, saya kira ini perlu lah penyelesaian. Sudah sekian tahun mereka jangan dilihat dari itu umpunya sekarang ada pihak-pihak yang tidak mendapat ganti rugi itu karena yang terdampak itu kan apa, pedagang. Padahal pedagang itu juga mengakibatkan juga ya mendapat kerugian atas tragedi itu musibah itu. Berapa banyak karyawan dan sebagainya yang tidak. Dan, ini sudah ada putusan MK, iya Keputusan MK berkaitan terhadap ini supaya untuk diberikan ganti rugi. Saya kira kita perlu patuh juga walaupun berapa kemampuan yang ada.

Yang kira itu saja Pak Ketua. Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik, saya mau sampaikan karena rapat ini terbuka dan direkam, saya kebetulan sudah tiga periode di sini dan Pimpinan terus, saya juga sudah bikin surat Pak Syarief kita **sendiri** yang teken ya untuk supaya ini bisa diselesaikan ya sesuai dengan kewenangan yang ada pada kita.

Memang terkait dengan penyelesaian akhir dari bencana lumpur Lapindo ini kepada warga terdampak sesuai ketentuan ini memang kita dorong terus Pak, sekarang bolanya itu sebetulnya sudah ada di Pemerintah dan Pemerintah sudah menunjuk mana yang bertanggung jawab ya, jadi saya rasa itu sekarang tinggal bagaimana Pemerintah menyelesaikan ini. **Barangkali** Pak Sekjen dan Pak Menteri PU juga hadir di sini secara virtual pasti mendengar dan seluruh dokumen itu pasti sudah ada, dan manakala itu memang wajib negara menyelesaikannya kalau menurut kita nggak ada alasan Pak, dari seluruh putusan hukum yang ada kalau memang masih ada kendala berarti kan bicara soal aturan main kita ya kan. Tapi kalau memang aturan mainnya sudah mengharuskan negara untuk membayar, memang kita harus bayar kan gitu.

Nah, Seperti apa penyelesaiannya itu murni urusan Pemerintah sebetulnya. Cuma Komisi V sebagai wakil rakyat kita mendorong, ya, kembalikan yang memang menjadi hak rakyat, selesaikan yang menjadi memang hak rakyat dan negara harus hadir di sana kalau aturan mainnya memang mengharuskan demikian. Kita hanya sebatas itu yang bisa kita lakukan.

Saya juga beberapa waktu yang lalu Pak Syarief, masih menerima seperti yang saya sampaikan saja warga dari yang terdampak yang belum menerima ini mempertanyakan kepada kita. Kalau saya tidak salah bahkan dari, saya juga sudah dikirim surat juga terkait surat dari Setneg, Pak Pratik yang tanda tangan kalau saya tidak salah ya Pak Sekjen ada **ya** suratnya ya? Ini terkait dengan penyelesaian masalah lumpur Lapindo ini.

Saya rasa nanti karena ini kita penetapan anggaran, ini kita buka saja nanti sesi ini di rapat pengawasan yang akan datang supaya nanti komprehensif kita bisa bicarakan dengan Kementerian dan lembaga yang terkait. Saya rasa ini tidak perlu ditanggapi dari mitra ya, cukup jadi catatan dan kalau memang bisa diselesaikan sebelum kita ketemu itu jauh lebih baik kan begitu.

Baik, sudah cukup ya? Pak Jhonni sudah?

Bapak-Ibu sekalian,

Kami juga mendorong Pak, seluruh mitra ya terutama Menteri PU, Menteri Perhubungan tadi saya bisik-bisik dengan Pak Wakil Ketua nih, Pak Rachmat Gobel. Terkait dengan bagaimana APBN ini juga membantu mendorong pertumbuhan terutama pemanfaatan produksi dalam negeri, komponen dalam negeri, TKDN istilahnya sekarang ya. Ya Instruksi Presiden ini kan Inpres ini. Sekarang kita melewati momen yang cukup berat yaitu kenaikan harga BBM. Tentu APBN ini salah satu instrumen Pak, yang kita menjadikan kekuatan bagi kita semua terutama negara dan juga rakyat untuk melewati masa-masa sulit ini. Salah satu upaya yang bisa kita lakukan dengan semaksimal mungkin menggunakan APBN ini untuk memanfaatkan produksi dalam negeri ya, meningkatkan kandungan produksi dalam negeri. Ini menjadi penting.

Kemudian, seluruh kegiatan-kegiatan apa namanya, padat karya juga tentu ini adalah yang ditunggu-tunggu juga oleh masyarakat ya. Kita tahu kenaikan BBM ini cukup tinggi dan ini satu dua bulan ke depan ini baru terasa Pak, benar-benar terasa dampaknya itu karena ini menyenggol semua sektor ini, seluruh sektor terdampak bahkan ya, **bahkan** mulai dari harga beras itu naik. Cuma memang kita tidak lagi melanjutkan, dulu ada program beli karet dulu, produk karet dulu ya. **Nah**, tahun ini kita tidak ada tapi nanti dalam misalnya dalam waktu berjalan ini dipandang perlu dan memungkinkan program-program sejenis misalnya untuk kita lakukan, kenapa tidak kan **begitu** ya, nanti kan ada sisa lelang dan seterusnya tapi ini sembari berjalannya waktulah ya apakah nanti sudah memungkinkan atau tidak, kan begitu Pak Sekjen ya, dari Kementerian PU terutama ini pernah kita jalani dulu membeli karet rakyat dulu, ini pernah kita lakukan pada waktu-waktu yang telah lalu. Dan, kalau memang memungkinkan dan ini dipandang cukup membantu kenapa tidak kita lakukan lagi di tahun ini, supaya kita juga turut serta mempermudah kesulitan-kesulitan masyarakat menghadapi dampak dari kenaikan BBM ini.

Bapak-Ibu sekalian,

Sekarang saya minta ditampilkan kesimpulan rapat yang tadi bagian dari hasil tadi adalah kesimpulan rapat. Silakan. Baik, angka-angkanya tidak akan saya bacakan lagi ya, karena tadi saya sudah bacakan, saya hanya membacakan poin-poinnya saja supaya tidak panjang.

Saya bacakan Draf Kesimpulan Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR RI dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri Perhubungan, Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi, Kepala BMKG, dan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau BASARNAS. Kamis, 8 September 2022.

1. Komisi V DPR RI dapat menyetujui Pagu Anggaran masing-masing Kementerian,

Ini, ini kenapa bikin kalimatnya ini *yok*, Mas kalau kurang kopi bikin Mas itu, bikin kopi dulu ya. Jadi, kita yang biasa nyusun bagus ini kalau nyangkut-nyangkut begini, nyangkut jatohnya. Baik.

1. Komisi V DPR RI dapat menyetujui Pagu Anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, dan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas sesuai dengan Nota Keuangan dari RAPBN Tahun 2023 sebagaimana yang tadi sudah kita bacakan.

Itu poin pertamanya. Poin keduanya atau poin paling terakhir.

2. Komisi V DPR RI bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi, Badan, Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, dan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas sepakat untuk melakukan sinkronisasi anggaran menurut fungsi dan program dalam RAPBN Tahun 2023 sesuai dengan saran, masukkan atau usulan Komisi V DPR RI.

Saya tanya dulu kepada seluruh Pimpinan dan Anggota Komisi V DPR RI. Apakah kesimpulan ini dapat kita setujui?

(RAPAT: SETUJU)

F- P. GERINDRA (SUDEWO, S.T., M.T.):

Pimpinan, Pimpinan. Sebenarnya tidak ada yang salah, esensinya sama. Tapi, sebaiknya diseragamkan. Kalau di poin 1, Kementerian PUPR itu dijabarkan, di poin 2 sebaiknya dijabarkan juga.

KETUA RAPAT:

Hanya penulisan?

F- P. GERINDRA (SUDEWO, S.T., M.T.):

Iya penulisan.

KETUA RAPAT:

Baik. Penulisannya diperbaiki. Baik, cukup? Baik, saya ketok lagi dulu Mas, karena ada interupsi tadi. setuju ya?

(RAPAT: SETUJU)

Baik, dari Kementerian PUPR setuju?

MENTERI PUPR RI (Dr. (H.C.) Ir. H. MOCHAMAD BASUKI HADIMOELJONO, M.Sc., Ph.D.):

Setuju, Pak.

KETUA RAPAT:

Setuju, terima kasih Pak Menteri.

(RAPAT: SETUJU)

Cepat sehat Pak, kami kangen ini. Ya, Kementerian Perhubungan setuju?

(RAPAT: SETUJU)

Baik. Kementerian Desa, PDT, Transmigrasi? Setuju.

(RAPAT: SETUJU)

Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan? Setuju.

(RAPAT: SETUJU)

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

KEPALA BMKG (Prof. Ir. DWIKORITA KARNAWATI, M.Sc., Ph.D.):

Setuju.

KETUA RAPAT:

Setuju, baik.

(RAPAT: SETUJU)

Maka saya tanya kita semua setuju?

(RAPAT: SETUJU)

Baik, terima kasih.

F- P. NASDEM (ROBERTH ROUW) – WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:

Pimpinan, kita sudah lama belum lihat Pak Menteri PUPR, ini. Tolong keluarin dulu lah kita lihat Beliau dulu.

KETUA RAPAT:

Pak Roberth kangen Pak, mana coba?

MENTERI PUPR RI (Dr. (H.C.) Ir. H. MOCHAMAD BASUKI HADIMOELJONO, M.Sc., Ph.D.):

Shalom.

Shalom Pak, terima kasih.

F- P. NASDEM (ROBERTH ROUW) – WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:

Kita kangen Bapak ini.

MENTERI PUPR RI (Dr. (H.C.) Ir. H. MOCHAMAD BASUKI HADIMOELJONO, M.Sc., Ph.D.):

Sama, Pak.

KETUA RAPAT:

Cepat sehat Pak Menteri, mantap.

ANGGOTA KOMISI V DPR RI:

Tambah muda, Pak.

MENTERI PUPR RI (Dr. (H.C.) Ir. H. MOCHAMAD BASUKI HADIMOELJONO, M.Sc., Ph.D.):

Amin.

KETUA RAPAT:

Sudah disiapkan gitar sama drumnya Pak, sudah disiapkan.

MENTERI PUPR RI (Dr. (H.C.) Ir. H. MOCHAMAD BASUKI HADIMOELJONO, M.Sc., Ph.D.):

Sudah minum (suara kurang jelas) bos.

KETUA RAPAT:

Terima kasih. Cepat sehat Pak Menteri.

MENTERI PUPR RI (Dr. (H.C.) Ir. H. MOCHAMAD BASUKI HADIMOELJONO, M.Sc., Ph.D.):

Amin, amin,

KETUA RAPAT:

Baik.

Bapak-Ibu sekalian,

Maka selesailah rapat kita pada hari ini dengan disepakatinya kesimpulan rapat, sebelum saya akhiri saya mohon salah satu dari Kementerian mewakili Pemerintah untuk menyampaikan kata-kata penutup. Dipersilakan Pak Menteri Perhubungan, silakan.

MENTERI PERHUBUNGAN RI (Ir. BUDI KARYA SUMADI):

Terima kasih, Pak Ketua.

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Shalom,
Om swastiastu,
Namo budhaya, dan
Salam kebajikan,*

**Yang saya hormati Wakil Ketua DPR Bapak Rachmat Gobel,
Ketua Komisi V,
Para Wakil Ketua Komisi V,
Dan para Anggota Komisi V yang saya hormati,
Pak Menteri PUPR yang ada di rumah, daring,
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi,
Ketua BMKG dan Ketua Basarnas,**

Tentu kami menyampaikan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa kita bisa menyelesaikan rangkaian kegiatan-kegiatan ini dengan baik dan segala dialog-dialog yang dilakukan antara Ketua, Wakil Ketua, Pimpinan, dan Anggota Komisi V cukup konstruktif, kritis dan memberikan suatu masukan bagi kami untuk melaksanakan dengan baik. Kami dari Pemerintah juga selaku pembantu presiden selalu konsisten bahwa apa yang kita lakukan adalah untuk rakyat. Jadi, kalau tadi ada tambahan *di stunting* pasti itu menjadi

satu tujuan yang akan dilakukan kita semuanya, juga hal-hal yang lain di daerah tertinggal pasti kita juga akan melakukan itu.

Terima kasih, kami diingatkan karena sebagai warga negara yang baik tentu kita harus saling mengingatkan dan pasti ada hal-hal yang kurang dari kami dan kami mohon maaf apabila kurang, **ada hal** kita saling melengkapi karena masih banyak tugas-tugas negara yang harus kita lakukan, masih banyak hal-hal yang harus kita pikirkan untuk bangsa ini. Semoga apa yang kita lakukan ini memberikan kemanfaatan yang baik bagi bangsa dan Allah memberikan jalan yang baik bagi kita.

Maaf apabila ada kekurangan.
Terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

**Wakil Ketua DPR yang kami hormati,
Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi V yang saya hormati,
Menteri PUPR, Menteri Perhubungan, Menteri Desa, PDT, dan
Transmigrasi, Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan serta
Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika yang kami hormati
beserta seluruh jajaran,
Bapak-Ibu sekalian yang berbahagia,**

Saya atas nama Pimpinan mengucapkan terima kasih atas seluruh atensi kita, atas rapat kita pada hari ini dan menyampaikan terima kasih atas kehadiran kita semua dan mohon maaf manakala dalam rapat ini ada hal-hal yang kurang berkenan.

Maka dengan demikian, selesailah rapat kita pada siang hari dalam menetapkan anggaran Kementerian/Lembaga mitra kerja Komisi V DPR RI. Dengan mengucap syukur *alhamdulillah* rapat ini saya nyatakan selesai dan saya tutup.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 11.00 WIB)

JAKARTA, 8 September 2022

a.n. KETUA RAPAT
SEKRETARIS RAPAT,

TTD

NUNIK PRIHATIN BUDIASTUTI, S.H.
NIP. 196912021998032002

